

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan membentuk opini publik. Media yang sebelumnya didominasi oleh saluran arus utama seperti surat kabar, radio, dan televisi kini mulai tergeser oleh kehadiran media sosial yang bersifat lebih partisipatif, interaktif, serta demokratis. Perubahan tersebut menandai pergeseran dari model komunikasi satu arah ke komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi produsen dan distributor narasi secara langsung.

Dalam konteks Indonesia, media sosial telah memainkan peran yang semakin strategis dalam menyampaikan isu-isu politik dan kebijakan publik. Berdasarkan laporan We Are Social bekerja sama dengan Meltwater dan Kepios (2025), lebih dari 143 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial setiap harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana hiburan, tetapi telah bertransformasi menjadi media utama pembentukan opini politik dan alat ekspresi aspirasi masyarakat. Pengalaman-pengalaman kolektif dalam berbagai peristiwa politik, seperti aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019 dan kampanye digital penolakan terhadap Omnibus Law, menunjukkan betapa kuatnya daya mobilisasi dan resonansi media sosial dalam mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu strategis.

Media sosial dengan segala kekuatan jangkauan dan kecepatannya juga berperan dalam membentuk narasi yang dapat bersifat provokatif, memihak, bahkan manipulatif. Konten yang viral tidak selalu mencerminkan kebenaran objektif, melainkan sering kali dipengaruhi oleh emosi, *framing* ideologis, dan strategi visual yang digunakan untuk menarik perhatian publik ((Brady et al., 2020). Hal tersebut memperkuat urgensi untuk memahami bagaimana pesan-pesan yang tersebar di media sosial ditafsirkan oleh publik yang beragam, dengan latar

belakang sosial, budaya, dan ideologis yang berbeda. Sebagai contoh, dalam isu revisi Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (UU TNI), media sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran informasi, tetapi juga arena pertarungan makna antara pihak pro dan kontra terhadap rencana revisi tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan resepsi menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini, karena memungkinkan untuk memahami bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons pesan-pesan tersebut.

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang mencuat sejak akhir 2024 dan berlanjut ke 2025 telah memantik respons luas dari masyarakat, baik dalam diskursus formal maupun di ruang publik digital. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah usulan perluasan peran TNI di luar urusan pertahanan negara, seperti pelibatan langsung dalam penanganan terorisme, keamanan siber, hingga keterlibatan dalam kegiatan domestik seperti penanggulangan bencana dan ketertiban umum. Menurut Chaterine (2025), pengesahan RUU TNI ini membawa perubahan signifikan pada poin-poin krusial yang memicu kekhawatiran masyarakat sipil terkait potensi kembalinya militerisme di ruang domestik, sebuah langkah yang dinilai bertentangan dengan amanat reformasi 1998.

Di ruang digital, wacana tersebut mendapat perhatian besar, sebagaimana terlihat dalam diskusi intensif yang berlangsung di berbagai platform media sosial, seperti Instagram dan YouTube. Tagar seperti #TolakRUUTNI dan #DukungRUUTNI menjadi indikator awal bagaimana isu tersebut memecah opini publik. Sebagai contoh, dalam kanal YouTube Raymond Chin yang menampilkan *podcast* bersama Felix Siau dan Guru Gembul, dibahas bahwa sebagian masyarakat, khususnya kelompok pro-demokrasi, menilai revisi tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang membuka ruang bagi dominasi militer di luar kerangka konstitusional. Mereka mengkhawatirkan bahwa revisi tersebut akan mengaburkan batas antara peran militer dan sipil, yang selama ini telah diperjuangkan agar terpisah dengan tegas sejak era Reformasi.

Sebaliknya, kelompok yang mendukung revisi berargumen bahwa tantangan keamanan nasional semakin kompleks serta membutuhkan keterlibatan langsung TNI dalam sektor-sektor strategis, seperti siber dan terorisme. Dalam diskusi di kanal YouTube Deddy Corbuzier, narasumber dari kalangan militer menyampaikan bahwa peran baru TNI justru dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan ancaman non-konvensional yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh aparat sipil.

Namun demikian, baik argumen pro maupun kontra sering kali dibingkai secara emosional di media sosial, dengan penggunaan visual, meme, serta narasi-narasi hiperbolik yang bertujuan membangun solidaritas, atau sebaliknya dapat menciptakan polarisasi. Di Instagram, konten visual seperti infografis dan poster digital digunakan untuk memperkuat posisi ideologis masing-masing kubu. Hal tersebut menunjukkan bagaimana media sosial tidak hanya menjadi saluran penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana *framing* yang efektif, dan pada saat bersamaan rawan digunakan untuk membentuk opini secara manipulatif atau bias (Boscarino, 2022).

Kontroversi RUU TNI dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai perdebatan yang bersifat umum dan abstrak, melainkan berpusat pada tiga aspek utama yang saling berhubungan, yaitu proses revisi, transparansi pembahasan, dan substansi atau isi perubahan pasal. Dari sisi proses, muncul kritik bahwa pembahasan revisi dilakukan secara cepat dan minim partisipasi publik. Dari sisi transparansi, masyarakat kesulitan mengakses draf resmi revisi sehingga ruang publik justru dipenuhi oleh spekulasi dan narasi yang simpang siur. Sementara dari sisi substansi, pasal-pasal terkait perluasan peran TNI di ranah sipil memunculkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan demokratis. Ketiga aspek inilah yang membentuk inti kontroversi revisi UU TNI dan menjadi dasar penting dalam memahami mengapa isu tersebut memicu respons emosional dan ideologis yang kuat di ruang digital, khususnya di YouTube.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan secara spesifik pada bagaimana pengguna YouTube memaknai isu kontroversi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) melalui konsumsi terhadap satu sumber utama, yaitu video pemberitaan yang membahas polemik revisi UU TNI dengan judul *"Revisi UU TNI, Peneliti PoshDem: Terburu-buru, Hanya untuk Kepentingan Sekelompok Orang"* yang diunggah di channel YouTube Kompas TV (tautan: [https://youtu.be/YxMBC\\_npxKk?si=kM5tBx35zNCn82mg](https://youtu.be/YxMBC_npxKk?si=kM5tBx35zNCn82mg)). Pemilihan video Kompas TV ini menjadi sumber utama yang didasarkan pada posisinya sebagai media arus utama yang memiliki kredibilitas jurnalistik, jangkauan audiens yang luas, serta peran strategis dalam membentuk agenda publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan media sosial secara umum sebagai objek penelitian, melainkan secara khusus menelaah resepsi audiens terhadap konten YouTube tertentu yang merepresentasikan wacana kontroversial mengenai revisi UU TNI.

Sebagai contoh, dalam video di kanal YouTube Kompas TV, ditampilkan narasi kontra yang menggarisbawahi sejarah masa lalu keterlibatan militer dalam politik sipil, serta kekhawatiran akan menurunnya kontrol sipil terhadap institusi militer. Di sinilah peran media sosial menjadi penting, bukan hanya dalam menyebarluaskan narasi, tetapi juga dalam menciptakan ruang dialog (atau konflik) antar ideologi. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pro-kontra terhadap RUU TNI tidak berlangsung secara linear, tetapi melibatkan pertarungan simbolik dan wacana yang diproduksi serta dikonsumsi secara visual serta interaktif oleh publik digital.

Dalam konteks komunikasi politik kontemporer yang kian sarat dengan simbol, visualisasi, dan interaktivitas digital, pendekatan analisis resepsi menjadi relevan untuk memahami bagaimana pesan-pesan politik ditafsirkan secara berbeda oleh khalayak. Pendekatan tersebut bertumpu pada asumsi dasar bahwa makna tidak melekat secara tetap pada suatu teks atau media, tetapi dibentuk melalui proses interpretasi aktif oleh audiens yang membawa latar belakang sosial, budaya, politik, dan ideologis masing-masing (Lister, 2023). Dengan kata lain, makna tidak

bersifat tunggal dan objektif, melainkan polisemi, yaitu terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsir.

Dalam kajian media, analisis resepsi berakar pada teori *encoding/decoding* yang dikembangkan oleh Stuart Hall. Hall membedakan tiga posisi dominan dalam pembacaan pesan media, yaitu posisi hegemonik (*dominant reading*), posisi negosiasi (*negotiated reading*), dan posisi oposisi (*oppositional reading*). Pembaca dengan posisi hegemonik menerima makna seperti yang diinginkan oleh pembuat pesan, sedangkan posisi negosiasi menyetujui sebagian makna namun menolak bagian lain, dan posisi oposisi secara aktif menolak makna dominan serta membangun tafsir alternatif (Briandana & Azmawati, 2020). Dalam konteks RUU TNI, pendekatan tersebut memungkinkan untuk memahami mengapa satu konten visual yang sama dapat dipahami secara kontradiktif oleh audiens yang berbeda.

Di media sosial seperti Instagram dan YouTube, visualisasi isu politik tidak lagi hadir sebagai representasi yang netral. Poster digital, infografis, video opini, hingga meme politik merupakan bentuk komunikasi visual yang sarat muatan ideologis dan kerap sengaja dirancang untuk mempengaruhi persepsi publik. Oleh sebab itu, analisis terhadap bagaimana pengguna media sosial menafsirkan konten visual mengenai RUU TNI dapat mengungkap dinamika sosial-politik yang tersembunyi di balik produksi dan konsumsi pesan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa audiens media sosial cenderung tidak pasif, melainkan partisipatif dalam membentuk makna dan merespons konten yang mereka konsumsi (Pantic, 2020). Dalam konteks Indonesia, khususnya pasca-Reformasi, keterlibatan publik dalam diskursus politik melalui media sosial mengalami lonjakan signifikan, sehingga menjadikan platform tersebut sebagai medan penting untuk pertarungan wacana, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti RUU TNI. Pendekatan resepsi memungkinkan untuk menangkap bagaimana identitas politik, sejarah personal, dan pengalaman sosial pengguna berpengaruh pada cara mereka memaknai konten visual politik.

Dengan menggunakan analisis resepsi, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana audiens memaknai konten visual tentang RUU TNI pada video berjudul *"Revisi UU TNI , Peneliti PoshDem: Terburu-buru, Hanya untuk Kepentingan Sekelompok Orang"* yang diunggah di *channel* YouTube Kompas TV. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengungkap makna literal dari konten yang dikonsumsi, tetapi juga menelusuri bagaimana posisi ideologis audiens terbentuk dan beroperasi dalam menafsirkan isu-isu politik yang kompleks. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat meningkatnya polarisasi di ruang digital, yang memperlihatkan bahwa media sosial bukan hanya arena komunikasi, tetapi juga arena kontestasi politik visual yang intens.

Dengan batasan fokus tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami variasi pemaknaan audiens terhadap representasi kontroversi revisi UU TNI dalam video Kompas TV, bukan untuk mengukur tingkat dukungan politik atau mengevaluasi isi kebijakan. Fokus pada resepsi terhadap proses dan transparansi memungkinkan penelitian ini mengungkap bagaimana audiens membangun kepercayaan, kecurigaan, atau kritik terhadap aktor politik dan institusi negara melalui konsumsi media. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif dalam kajian komunikasi, yakni menggali makna, pengalaman, dan interpretasi subjektif audiens dalam berinteraksi dengan pesan media.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana wacana visual mengenai isu-isu strategis seperti RUU TNI diproduksi, didistribusikan, dan yang paling penting diterima serta ditafsirkan oleh publik. Dalam konteks Indonesia, di mana militer memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam politik dan masih menjadi aktor penting dalam berbagai wacana keamanan nasional, RUU TNI bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan juga menjadi medan kontestasi makna yang luas di ranah publik (Effendy, 2025). Ketika isu tersebut hadir dalam bentuk visual di media sosial, isu tersebut bertransformasi menjadi objek tafsir yang terbuka, serta dapat memicu respons emosional dan ideologis yang tajam dari masyarakat.



Di tengah era disrupsi informasi saat ini, visualisasi isu-isu politik di media sosial tidak hanya memfasilitasi diskusi publik, tetapi juga memperkuat perpecahan sosial akibat perbedaan latar belakang, afiliasi politik, dan preferensi media dari masing-masing individu. Dalam konteks RUU TNI, hal tersebut memperlihatkan bahwa tafsir atas konten visual di media sosial tidaklah seragam, bahkan dapat menjadi sumber polarisasi yang mengancam demokrasi.

Penelitian ini menjadi signifikan karena belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana masyarakat Indonesia menerima dan menafsirkan konten visual politik terkait isu RUU TNI di media sosial YouTube. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada produksi dan penyebaran pesan politik, namun cenderung mengabaikan peran aktif audiens dalam proses pembentukan makna (Earl & Garrett, 2020). Dengan pendekatan analisis resepsi, penelitian ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan menempatkan audiens sebagai subjek analisis utama, sekaligus membuka ruang untuk memahami dinamika interaksi antara teks visual, konteks sosial-politik, dan konstruksi makna.

Selain berkontribusi secara akademik dalam pengembangan kajian komunikasi visual dan kajian media di Indonesia, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam ranah kebijakan publik serta literasi digital. Di tengah tingginya tensi politik dan berkembangnya praktik disinformasi, pemahaman terhadap bagaimana publik menafsirkan simbol-simbol visual politik menjadi penting untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih inklusif, empatik, dan tidak memperkuat polarisasi. Penelitian ini juga dapat memperkaya pemikiran kritis masyarakat dalam mengonsumsi media, khususnya dalam melihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui citra dan representasi visual (Hobbs, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademis akan pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi visual serta analisis resepsi di era digital, tetapi juga menawarkan kontribusi nyata dalam mengelola kompleksitas wacana publik yang muncul di tengah transformasi ekosistem media dan politik Indonesia saat ini.

Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji RUU TNI dari perspektif hukum normatif atau menilai benar-salahnya substansi pasal secara yuridis. Fokus penelitian ini secara spesifik diarahkan pada bagaimana audiens memaknai kontroversi RUU TNI, khususnya yang berhubungan dengan persepsi terhadap proses revisi dan transparansi pembahasannya sebagaimana direpresentasikan dalam video Kompas TV di YouTube. Dengan demikian, isu substansi hukum diposisikan sebagai konteks wacana, bukan sebagai objek evaluasi hukum. Penegasan batasan ini menjadi penting agar penelitian tetap konsisten sebagai penelitian komunikasi, bukan penelitian hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengguna media sosial Youtube merespons dan memaknai wacana RUU TNI yang tengah berkembang di ruang publik digital Indonesia. Dengan melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam respons yang muncul di kalangan pengguna YouTube terkait RUU TNI, serta bagaimana konten visual yang tersebar di platform tersebut dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi proses *decoding* pesan-pesan yang berkaitan dengan RUU TNI di media sosial YouTube pada video Kompas TV, serta menganalisis bagaimana perbedaan latar belakang dan ideologi pengguna YouTube berkontribusi dalam membentuk makna yang beragam terhadap isu tersebut. Oleh sebab itu, masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengguna media sosial YouTube merespons dan memaknai wacana revisi UU TNI yang berkembang di ruang publik digital Indonesia.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengguna media sosial YouTube merespons dan memaknai wacana revisi UU TNI yang berkembang di ruang publik digital Indonesia?



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengguna media sosial YouTube merespons dan memaknai wacana revisi UU TNI yang tengah berkembang di ruang publik digital Indonesia

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks media sosial dan analisis resepsi. Dengan berfokus pada pengguna YouTube sebagai objek penelitian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media sosial visual berfungsi dalam membentuk opini publik dan menyebarkan wacana politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas aplikasi teori resepsi dalam konteks media digital, khususnya dalam memahami bagaimana masyarakat aktif terlibat dalam mendekode pesan politik melalui interaksi digital. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan memberikan perspektif baru bagi kajian komunikasi politik digital, serta memperkaya literatur tentang peran media sosial dalam demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, khususnya dalam memahami dinamika komunikasi publik di era digital. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait cara penyampaian informasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap opini dan sikap publik yang berkembang di media sosial. Bagi politisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana wacana politik diterima dan diproses oleh masyarakat, serta bagaimana pesan politik dapat disampaikan secara lebih efektif melalui media sosial. Selain itu, bagi praktisi komunikasi dan media, penelitian ini dapat memberikan panduan tentang

bagaimana menyusun strategi komunikasi yang tepat dalam menyikapi isu-isu sensitif seperti RUU TNI, yang melibatkan sentimen publik yang beragam.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Di tingkat sosial, penelitian ini memiliki kegunaan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu penting seperti RUU TNI. Dengan menganalisis cara pengguna YouTube merespons dan memaknai wacana revisi tersebut, penelitian ini dapat membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam diskursus politik dan kebijakan negara. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memperkaya wacana publik mengenai peran militer dalam kehidupan sipil serta memotivasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas partisipasi politik dan pengawasan sosial terhadap kebijakan negara di era media sosial.

## **1.6 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini mencakup beberapa aspek untuk memastikan fokus yang jelas dalam analisis. Pertama, penelitian ini hanya akan mengkaji respons dan pemaknaan pengguna media sosial YouTube terhadap wacana RUU TNI yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025, sehingga isu yang diteliti terbatas pada periode waktu tersebut. Kedua, analisis hanya akan berfokus pada konten visual yang muncul di platform YouTube, khususnya dalam video Kompas TV yang berjudul "*Revisi UU TNI, Peneliti PoshDem: Terburu-buru, Hanya untuk Kepentingan Sekelompok Orang*", tanpa mengkaji konten berbentuk teks atau yang ada di platform media sosial lain. Ketiga, penelitian ini akan dibatasi pada respons dari pengguna YouTube di Indonesia, dengan fokus pada kelompok pengguna yang aktif berinteraksi dengan isu revisi RUU

TNI melalui komentar, unggahan, dan berbagi konten. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan resepsi untuk menganalisis bagaimana pesan-pesan visual tersebut dimaknai oleh pengguna YouTube, tanpa melakukan analisis lebih dalam terhadap dampak atau konsekuensi hukum dari revisi UU TNI itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam aspek teknis atau prosedural RUU TNI, melainkan hanya respons publik terhadapnya di media sosial YouTube.

